



Kementerian Pertanian
BPPSDMP

RENSTRA BAPELTAN LAMPUNG 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen **Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung Tahun 2025–2029** dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan penjabaran teknis dan arah kebijakan operasional Balai Pelatihan Pertanian Lampung dalam mendukung visi besar Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Sebagai unit kerja yang berfokus pada pengembangan kompetensi, Renstra ini menjadi kompas bagi kami untuk mencetak SDM pertanian yang profesional, mandiri, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing global di wilayah kerja kami.

Penyusunan Renstra 2025–2029 ini mengacu pada:

- **RPJMN 2025–2029** (Perpres No. 12 Tahun 2025).
- **Renstra Kementerian Pertanian 2025-2029**
- **Renstra BPPSDMP 2025–2029.**
- **Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025** tentang transformasi sistem penyuluhan dan pelatihan pertanian.

Dalam lima tahun ke depan, Bapeltan Lampung berkomitmen untuk melakukan transformasi pelatihan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, penguatan digitalisasi pertanian (*smart farming*), serta akselerasi regenerasi petani melalui pelatihan vokasi yang intensif. Kami menyadari bahwa tantangan krisis pangan global menuntut kesiapan aparatur dan non-aparatur pertanian yang lebih tangguh dan inovatif.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran di BPPSDMP, mitra kerja, praktisi, serta seluruh staf Bapeltan Lampung yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen strategis ini.

Semoga Renstra Bapeltan Lampung 2025–2029 ini dapat diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab demi mewujudkan kedaulatan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya di wilayah Lampung dan sekitarnya.



Kepala Balai,

Dr.P., Adi Destriadi Sutisna, S.P, M.P ✦
NIP. 19811225 200901 1 010

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan pertanian nasional pada periode tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan pembangunan nasional. RPJMN tersebut menekankan transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah sektor pertanian, serta pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Dalam kerangka kebijakan tersebut, sektor pertanian memiliki peran strategis sebagai penopang ketahanan pangan nasional, penggerak perekonomian, serta sumber penghidupan masyarakat perdesaan. Keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan teknologi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang profesional, adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, berdaya saing, dan memiliki jiwa kewirausahaan.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan dan sasaran strategis pembangunan pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029. Kebijakan dan sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana strategis unit kerja Eselon I, termasuk Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BPPSDMP merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian serta pengembangan sumber daya manusia pertanian. Pelaksanaan mandat tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian melalui peningkatan kapasitas, kompetensi, dan daya saing sumber daya manusia. Sasaran program BPPSDMP yang ditetapkan dalam Renstra BPPSDMP Tahun 2025–2029 menjadi rujukan langsung bagi seluruh Unit Pelaksana Teknis di bawahnya dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis.

Dalam konteks tersebut, Balai Pelatihan Pertanian Lampung merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPSDMP, serta secara teknis dibina oleh Pusat Pelatihan Pertanian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian. Balai Pelatihan Pertanian Lampung melaksanakan tugas penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan non-aparatur pertanian dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan pembagian wilayah kerja UPT pelatihan lingkup BPPSDMP, Balai Pelatihan Pertanian Lampung melayani wilayah Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran program BPPSDMP dan sasaran strategis Kementerian Pertanian, Balai Pelatihan Pertanian Lampung berperan sebagai pelaksana operasional pengembangan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui penyelenggaraan pelatihan teknis, fungsional, dan tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan pertanian dan karakteristik wilayah kerja. Oleh karena itu, Balai Pelatihan Pertanian Lampung menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen cascading perencanaan dan kinerja yang selaras dengan Renstra BPPSDMP dan Renstra Kementerian Pertanian.

Pelaksanaan tugas Balai Pelatihan Pertanian Lampung berada dalam lingkungan strategis yang dinamis, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, tantangan dan peluang dihadapi terkait kapasitas sumber daya manusia,

ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelatihan, sistem manajemen pelatihan, serta luasnya wilayah kerja yang mencakup empat provinsi dengan karakteristik pertanian yang beragam. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan pelatihan yang adaptif, efektif, dan berbasis kebutuhan pengguna layanan.

Secara eksternal, Balai Pelatihan Pertanian Lampung dihadapkan pada dinamika kebijakan pembangunan pertanian nasional, tuntutan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia pertanian, perkembangan teknologi dan digitalisasi pelatihan, serta perubahan sosial ekonomi masyarakat pertanian. Lingkungan strategis tersebut memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi UPT dan menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan strategi serta penajaman sasaran kinerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung Tahun 2025–2029 agar tetap relevan dan selaras dengan sasaran strategis BPPSDMP.

B. Potensi dan Permasalahan

Balai Pelatihan Pertanian Lampung adalah salah satu unit pelaksana teknis UPT Pusat di bidang pelatihan pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang secara teknis di bawah Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, dengan tugas sesuai Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung, yaitu : “Melaksanakan Pelatihan Fungsional bagi Aparatur, Pelatihan Teknis dan Profesi di Bidang Pertanian bagi Aparatur dan Non Aparatur”. Secara teknis, Balai Pelatihan Pertanian Lampung mempunyai fungsi:

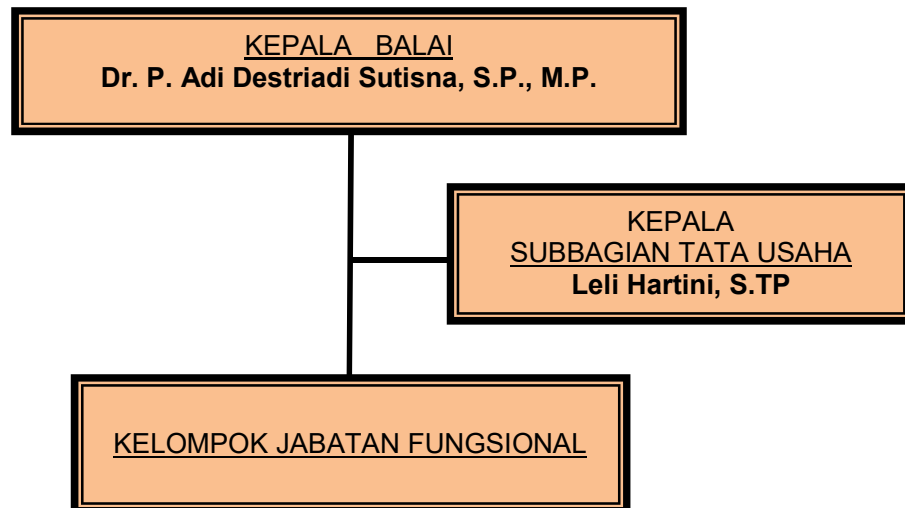
- a. penyusunan program, rencana kerja, anggaran, dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
- d. penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis, dan profesi di bidangnya;
- e. pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;

- f. pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya;
- g. pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- h. pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya;
- i. pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional, pelatihan teknis, dan profesi, serta penyusunan model dan teknik pelatihan di bidangnya;
- j. pengelolaan unit inkubator agribisnis;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
- l. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
- m. pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- n. pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan; dan
- o. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, urusan keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, maka disusunlah struktur organisasi yang terdiri dari

- Kepala Balai
- Subbagian Tata Usaha
- Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG



Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan keuangan, urusan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, prasarana dan sarana, penatausahaan barang milik/kekayaan negara, persuratan, kearsipan, dan hubungan masyarakat lingkup Bapeltan.

1. Potensi (Kekuatan & Peluang)

Bapeltan Lampung memiliki modalitas kuat untuk menjadi pusat unggulan pelatihan pertanian di empat wilayah Sumatera yakni Lampung, Sumatera Selatan, Bangka dan Bengkulu. Modalitas kuat tersebut ialah :

- **Pusat Inkubator Agribisnis (PIA):** Keberadaan PIA memungkinkan balai tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung dalam hilirisasi dan manajemen bisnis pertanian yang modern.
- **Akreditasi & Sertifikasi:** Sebagai lembaga pelatihan di bawah BPPSDMP, Bapeltan Lampung memiliki kewenangan dalam memfasilitasi sertifikasi profesi pertanian yang sangat dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini.
- **Sinergi Kawasan Strategis:** Lampung merupakan pintu gerbang Sumatera dan salah satu lumbung pangan nasional. Lokasi ini memudahkan koordinasi dengan program Swasembada Pangan maupun optimalisasi lahan rawa yang menjadi prioritas pemerintah 2025–2029.
- **Jaringan Widyaiswara & Pakar:** Ketersediaan tenaga fungsional widyaiswara yang kompeten di bidang teknis dan kewirausahaan merupakan aset utama dalam transfer teknologi ke petani milenial.
- **Adopsi Teknologi (Smart Farming):** Peluang untuk mengintegrasikan *Internet of Things* (IoT) dalam kurikulum pelatihan guna menarik minat generasi muda (Gen Z dan Milenial) ke sektor pertanian.

2. Permasalahan (Kelemahan & Tantangan)

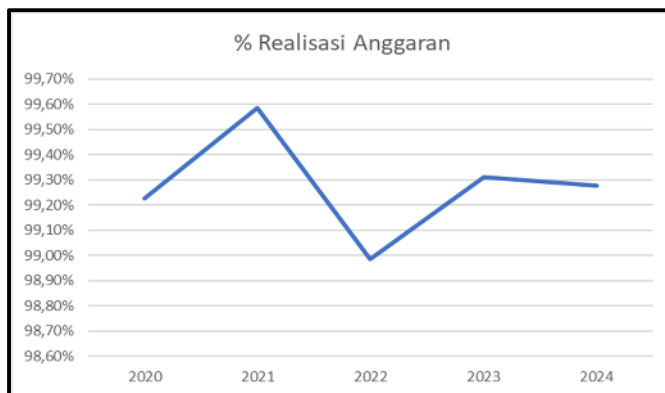
Beberapa hambatan yang perlu dimitigasi dalam lima tahun ke depan meliputi:

- **Monitoring & Evaluasi Pasca-Diklat:** Lemahnya sistem pemantauan terhadap alumni pelatihan. Seringkali tidak diketahui apakah peserta benar-benar menerapkan ilmu yang didapat di lapangan (efektivitas pelatihan).

- **Kesenjangan Sarana Prasarana:** Kebutuhan akan renovasi laboratorium atau *greenhouse* yang lebih modern agar relevan dengan perkembangan teknologi pertanian 4.0.
- **Regenerasi Petani:** Rendahnya minat pemuda di pedesaan Lampung untuk bertani secara konvensional, sementara kurikulum pelatihan terkadang masih dianggap kurang "kekinian".
- **Keterbatasan Anggaran:** Fluktuasi anggaran negara yang seringkali memaksa rasionalisasi jumlah peserta atau frekuensi pelatihan setiap tahunnya.
- **Koordinasi Lintas Sektoral:** Masih adanya tumpang tindih program pelatihan antara pusat dan daerah, sehingga sasaran peserta pelatihan (Penyuluh atau Petani) terkadang tidak merata.

C. Capaian Kinerja UPT Periode Sebelumnya

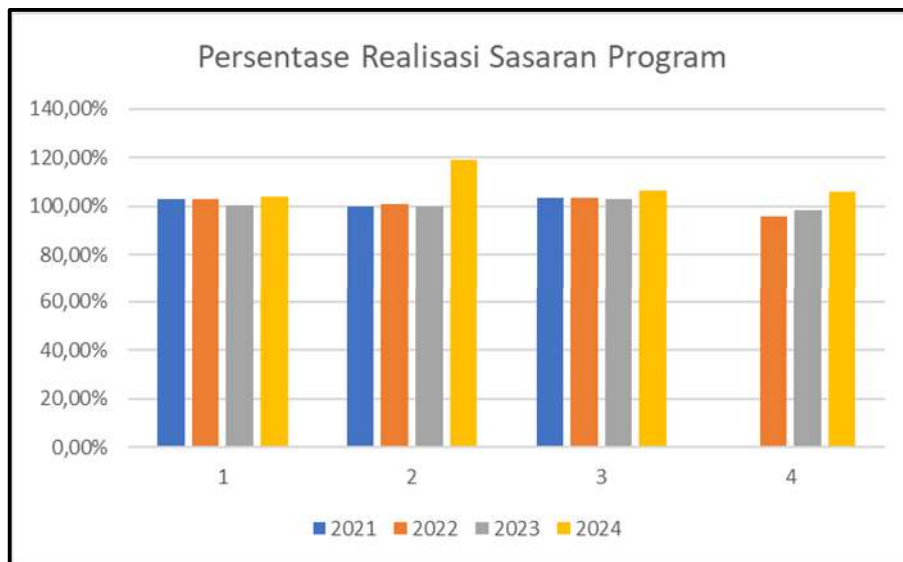
Capaian kinerja realisasi anggaran Balai Pelatihan Pertanian Lampung selama periode Tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik dan relatif stabil. Persentase realisasi anggaran pada periode tersebut secara konsisten berada di atas 98 persen, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tren dan perkembangan realisasi anggaran Balai Pelatihan Pertanian Lampung selama Tahun 2020–2024, berikut disajikan grafik persentase realisasi anggaran sebagai bahan analisis capaian kinerja secara visual :



Grafik Persentase Realisasi Anggaran 2020-2024

Capaian realisasi sasaran kinerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung selama periode Tahun 2021 sampai dengan 2024 menunjukkan hasil yang positif dan konsisten. Berdasarkan indikator kinerja utama yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi, peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian, terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan prima, serta peningkatan tata kelola anggaran, secara umum capaian kinerja telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan dan tren capaian realisasi sasaran kinerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung selama Tahun 2021–2024, berikut disajikan grafik capaian kinerja berdasarkan masing-masing indikator sebagai bahan analisis lebih lanjut.



Keterangan Indikator :

1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia pertanian melalui pelatihan vokasi pertanian.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pelatihan pertanian.
3. Terwujudnya Birokrasi Balai Pelatihan Pertanian Lampung yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Pelayanan Prima.
4. Meningkatnya Tata Kelola Anggaran Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Pertanian

Arah pembangunan sektor pertanian nasional berlandaskan pada visi Kementerian Pertanian, yaitu “Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sektor pertanian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, khususnya petani, sebagai bagian dari pembangunan nasional jangka panjang.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan misi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani serta penajaman reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Misi ini menjadi pedoman bagi seluruh organisasi dan unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian agar selaras, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan publik yang berkualitas.

B. Visi, Misi, dan Tujuan BPPSDMP 2025–2029

Balai Besar Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) mengusung visi “SDM Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera sebagai aset dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan peran strategis SDM pertanian sebagai pilar utama pembangunan pertanian nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPPSDMP menetapkan misi yang berfokus pada regenerasi petani guna menjamin ketersediaan dan kualitas SDM pertanian di masa depan, peningkatan produktivitas, kompetensi, dan kemandirian aset SDM pertanian, serta penguatan tata kelola pemerintahan BPPSDMP yang transparan,

akuntabel, dan profesional. Misi ini menjadi landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan SDM pertanian secara terintegrasi.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, BPPSDMP menetapkan tujuan strategis berupa meningkatnya jumlah petani muda dan milenial yang menetap dan berusaha di desa, meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani, serta terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel, dan profesional. Pencapaian tujuan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas SDM pertanian sekaligus meningkatkan kinerja organisasi dalam mendukung pembangunan pertanian nasional.

Sasaran Program BPPSDMP

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi BPPSDMP diarahkan untuk meningkatkan kelas kemampuan pelaku usaha tani melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Program ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas penyuluh pertanian, petani, peserta pelatihan, serta mendorong regenerasi petani, khususnya petani milenial, guna mendukung keberlanjutan pembangunan pertanian nasional.

Melalui kegiatan penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan, pendidikan vokasi, serta penilaian dan pengembangan kompetensi, BPPSDMP menargetkan peningkatan kompetensi petani, ASN pertanian, dan lulusan pendidikan vokasi pertanian. Selain peningkatan kompetensi teknis, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan, serta meningkatkan kepuasan peserta terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan vokasi.

Selain program vokasi, BPPSDMP melaksanakan Program Dukungan Manajemen untuk mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik, transparan, dan akuntabel. Program ini mendukung peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal, pelaksanaan reformasi birokrasi, serta peningkatan kepuasan masyarakat dan unit kerja terhadap layanan publik, termasuk layanan perpustakaan, literasi pertanian, dan museum tanah dan pertanian.

C. Sasaran dan Indikator Kinerja UPT

1. Hubungan Strategis

- **Final Outcome (Kementerian):** Meningkatnya Kesejahteraan Petani.
- **Intermediate Outcome (Sektor):** Meningkatnya Pendapatan Petani (NTUP & Nilai Tambah per Tenaga Kerja).
- **Immediate Outcome (BPPSDMP):** Meningkatnya Kualitas Penyuluh Pertanian dan Kapasitas Regenerasi Petani (Petani Milenial/Brigade Pangan).
- **Sasaran UPT (Bapeltan Lampung):** "Meningkatnya Kompetensi SDM Pertanian yang Profesional, Mandiri, dan Berjiwa Wirausaha di Wilayah Kerja Bapeltan Lampung."

2. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) UPT

Agar kontribusi UPT bersifat terukur dan sah secara teknokratis, berikut adalah indikator Balai Pelatihan Pertanian Lampung :

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025	Target 2026
Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan	Indeks Kesenjangan Kompetensi (Aparatur)	20.00%	18.00%
	Indeks Kesenjangan Kompetensi (Non-Aparatur)	25.00%	23.00%
Meningkatnya Kepuasan Peserta Pelatihan	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pelatihan (Likert 1-5)	4	4.1
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90.00%	90.25%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Likert 1-4)	3.6	3.61
Meningkatnya Layanan Internal (TU)	Indeks Kepuasan Internal (Likert 1-4)	3.6	3.61

Dengan rumusan di atas, Balai Pelatihan Pertanian Lampung berkontribusi pada **Pilar SDM** dalam Pohon Kinerja Kementerian Pertanian. Keberhasilan Balai Pelatihan Pertanian Lampung dalam melatih penyuluh dan petani secara langsung akan:

1. Meningkatkan kualitas pendampingan petani (via penyuluh).
2. Meningkatkan efisiensi produksi dan nilai tambah (via penerapan teknologi oleh petani).
3. Berkontribusi pada peningkatan **Nilai Tukar Usaha Tani (NTUP)** sebagai indikator kesejahteraan petani di level nasional.

Manajemen Resiko

Manajemen risiko di Balai Pelatihan Pertanian Lampung diterapkan sebagai bagian integral dari pencapaian sasaran kinerja unit pelaksana teknis, khususnya pada level operasional. Penerapan manajemen risiko difokuskan pada upaya pengendalian risiko yang berpotensi menghambat pelaksanaan layanan pelatihan, kegiatan operasional, serta aktivitas teknis di lapangan. Dengan demikian, manajemen risiko menjadi instrumen penting dalam menjamin keberlangsungan dan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi BapelTan Lampung.

Dalam pelaksanaannya, identifikasi dan pengelolaan risiko diarahkan pada risiko layanan, risiko operasional, dan risiko teknis lapangan yang melekat pada setiap kegiatan. Risiko tersebut antara lain berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan, pengelolaan sumber daya, ketepatan pelaksanaan jadwal kegiatan, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan indikator yang bersifat operasional dan terukur, sehingga memungkinkan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Melalui penerapan manajemen risiko yang sistematis dan terintegrasi dengan sasaran kinerja, Balai Pelatihan Pertanian Lampung berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, meminimalkan potensi gangguan operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap penerapan manajemen risiko. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya layanan pelatihan pertanian yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.

D. Pohon Kinerja

1. FINAL OUTCOME (Kementerian Pertanian)

Meningkatnya Kesejahteraan Petani dengan Indikator:

- Nilai Tukar Petani (NTP)

Balai Pelatihan Pertanian Lampung berkontribusi melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM petani dan penyuluh.

2. INTERMEDIATE OUTCOME (Sektoral)

Meningkatnya Pendapatan Petani dan Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian dengan Indikator:

- Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)
- Produktivitas Tenaga Kerja Pertanian

Pendapatan meningkat karena usaha tani makin efisien, berdaya saing, dan berorientasi pasar.

3. IMMEDIATE OUTCOME (Sasaran Strategis UPT – Bapeltan Lampung)

Meningkatnya kualitas SDM pertanian yang profesional, mandiri, dan berjiwa wirausaha dengan Indikator :

- Persentase alumni pelatihan yang menerapkan kompetensi
- Jumlah petani milenial / Brigade Pangan aktif
- Indeks Kepuasan Layanan Pelatihan (IKM)

Immediate outcome ini mendukung secara langsung:

- Akses pembiayaan dan usaha
- Regenerasi petani
- Akses pasar dan efisiensi usaha tani

4. OUTPUT (Kinerja Operasional Bapeltan Lampung)

Pilar BPPSDMP	Output BAPELTAN Lampung	Kegiatan Utama	Indikator
Diklat Vokasi	SDM pertanian kompeten	Pelatihan teknis, manajerial, kewirausahaan	Jumlah aparatur & non-aparatur dilatih
Sertifikasi Profesi	SDM tersertifikasi dan diakui industri	Uji kompetensi LSP – BNSP	Jumlah SDM tersertifikasi
Brigade Pangan	Petani milenial & kelompok usaha tani modern	Inkubasi bisnis, pendampingan, akses KUR	Jumlah kelompok Brigade aktif
Standarisasi Sarpras	Lingkungan pelatihan modern & sesuai industri	Smart farming, lab, kebun praktik	Persentase sarpras sesuai standar

BAB III **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian 2025–2029

Arah kebijakan pembangunan sektor pertanian difokuskan pada peningkatan pendapatan petani sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia. Kebijakan ini menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan, dengan mendorong peningkatan kapasitas, produktivitas, dan daya saing usaha tani secara berkelanjutan guna memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan dan mendukung pembangunan pertanian nasional.

Untuk mendukung arah kebijakan peningkatan pendapatan petani dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan. Strategi pembangunan SDM pertanian difokuskan pada penguatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, serta peningkatan kualitas aparatur dan kelembagaan pertanian agar mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor pertanian. Sejalan dengan hal tersebut, ditetapkan beberapa strategi utama sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan SDM pertanian yaitu sebagai berikut :

1. Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani melalui kegiatan penyuluhan serta penguatan modal manusia (human capital) pertanian berbasis kompetensi.
2. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara bidang pertanian serta peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian nasional.

B. Arah Kebijakan dan Strategi BPPSDMP 2025–2029

Arah kebijakan BPPSDMP difokuskan pada terwujudnya tata kelola birokrasi yang transparan, akuntabel, dan profesional. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan program berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, strategi yang ditempuh adalah melalui implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDMP secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan good government dan clean governance. Pelaksanaan strategi ini diarahkan pada penguatan sistem manajemen kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penegakan akuntabilitas dan integritas aparatur dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

C. Strategi Operasional UPT 2025–2029

Untuk memastikan kebijakan strategis BPPSDMP terealisasi di tingkat lapangan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) bertindak sebagai **ujung tombak operasional**. Sebagai perpanjangan tangan BPPSDMP di daerah, Bapeltan Lampung memiliki peran krusial dalam mentransformasi kebijakan nasional menjadi aksi nyata di lapangan melalui fungsi pelatihan dan pengembangan SDM.

1. Strategi dalam meningkatkan kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional

- a) Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertaniang dengan Langkah operasional sebagai berikut:
 - Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
 - Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;
 - Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode online dan offline berbasis NIK;
 - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;

- Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan agar berdaya saing di tingkat nasional dan internasional melalui perbaikan fasilitas, sarana prasarana praktet, dan peningkatan kompetensi tenaga kepelatihan
 - Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;
 - Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri.
 - Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani
 - Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S sebagai lembaga pelatihan yang mandiri dalam berusahatani dan mampu menyelenggarakan pelatihan/ permagangan berbasis IPTEK Internasional
 - Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
- b) Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian dengan Langkah operasional sebagai berikut;
- Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
 - Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
 - Terwujudnya pendampingan pembentukan Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
 - Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;

- Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial.
 - Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian
 - Peningkatan branding bagi petani melalui pengukuhan DPM/DPA
- c) Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi sejalan dengan strategi BPPSDMP untuk regenerasi petani dengan Langkah operasional sebagai berikut:
- Inkubasi Bisnis Pertanian: Mengembangkan program magang dan inkubasi bagi petani milenial untuk mengubah pola pikir dari sekadar budidaya menjadi wirausaha (agribisnis).
 - Optimalisasi P4S: Melakukan pembinaan intensif terhadap Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) di wilayah Lampung dan sekitarnya sebagai mitra strategis dalam penyebaran inovasi secara peer-to-peer.

2. Strategi mewujudkan reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
- Penerapan manajemen talenta ASN;
 - Peningkatan sistem merit ASN;
 - Penataan jabatan fungsional;
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
- Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
- Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;

- Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
- d. Transformasi pelayanan publik, melalui:
 - Pelayanan publik berbasis elektronik (e-service);
 - Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - Penguatan ekosistem inovasi;
 - Penguatan pelayanan terpadu.

D. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang menjadi acuan bagi Balai Pelatihan Pertanian Lampung mengacu pada kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Kerangka regulasi tersebut berfungsi tidak hanya sebagai sarana untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan non aparatur pertanian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menjawab berbagai permasalahan yang bersifat penting, mendesak, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pengembangan SDM pertanian. Adapun regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan UPT yaitu :

1. Regulasi Perencanaan Strategis (Mandat Makro)

Regulasi ini menentukan arah kebijakan pertanian nasional yang harus diterjemahkan ke dalam kegiatan pelatihan.

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian Tahun 2025–2029. Ini adalah dokumen induk yang menetapkan target kinerja pelatihan pertanian selama lima tahun ke depan.
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026. Regulasi ini mengatur plafon biaya untuk pelaksanaan kegiatan (seperti uang saku peserta, honor pengajar, dan biaya konsumsi).
- Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yang menetapkan prioritas nasional (misalnya kedaulatan pangan atau modernisasi pertanian) yang harus didukung oleh sektor pelatihan.

2. Regulasi Organisasi dan Tata Kerja (Mandat Institusional)

Regulasi ini mengatur tugas pokok, fungsi, dan wewenang Balai Pelatihan Pertanian sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (sebagai payung hukum struktur organisasi induk).

3. Regulasi Pelaksanaan Pelatihan (Mandat Teknis)

Khusus untuk teknis penyelenggaraan di lapangan, BAPELTAN mengacu pada:

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian. Regulasi ini menggantikan aturan lama dan menjadi standar baru dalam standarisasi materi serta metode pelatihan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (masih relevan sebagai dasar sasaran peserta pelatihan dari kelompok tani/Gapoktan).

E. Kerangka Kelembagaan

Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) diawali dengan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Langkah strategis perubahan tersebut melalui agenda reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan, meliputi:

1. Aspek kelembagaan, guna melahirkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran);
2. Aspek tata laksana, guna melahirkan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance;
3. Peraturan perundang-undangan, guna melahirkan regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif;

4. Sumber daya manusia aparatur, guna melahirkan sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
5. Pengawasan, bertujuan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
6. Akuntabilitas, bertujuan meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi;
7. Pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
8. Mindset dan Cultural Set Aparatur, guna melahirkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Aspek kelembagaan dilakukan dengan menata kelembagaan organisasi, sampai dengan satuan kerja perangkat daerah dengan didasari semangat untuk mendorong terwujudnya struktur pemerintahan yang efisien dan efektif sebagai dampak dari kebijakan restrukturisasi organisasi Kementerian dan lembaga.

Aspek SDM aparatur Pembangunan pertanian ke depan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis, serta penataan simplifikasi birokrasi dengan menghilangkan fungsi pejabat administrator dan pengawas sehingga terwujud aparatur BPPSDMP yang profesional dan dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Balai Pelatihan Pertanian Lampung memiliki jabatan fungsional khusus dan Jabatan Pelaksana terdiri atas:

1. Widyaiswara;
2. Perencana;
3. Pustakawan;
4. Pranata Komputer;
5. Pranata Humas
6. Analis Pengelolaan Keuangan APBN
7. Arsiparis
8. Pelaksana

Penataan Ketatalaksanaan dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada unit organisasi. Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketatalaksanaan yang mampu menjamin efisiensi dan efektivitas penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Untuk itu, perlu dilaksanakan kegiatan antara lain peningkatan kualitas ketatalaksanaan yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur dan tata kerja organisasi, penyusunan dan penyempurnaan sistem dan prosedur serta penyusunan, harmonisasi dan penyempurnaan tata hubungan kerja unit kerja lingkup Balai Pelatihan Pertanian Lampung dan instansi terkait.

Dalam tata hubungan kerja pusat-daerah dan pengembangan SDM pertanian pasca diterapkannya otonomi daerah membutuhkan tata hubungan kerja yang dapat menjabarkan hasil pemetaan pembagian peran dan pengembangan SDM pertanian antara pusat dan daerah, sehingga tata hubungan kerja diharapkan dapat berfungsi dengan baik.

Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan belum sepenuhnya diselenggarakan sesuai disiplin program dan disiplin pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangan yang mengatur pemetaan kewenangan dan urusan serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah di bidang pertanian sehingga penjabaran dan implementasi Rencana Strategis Balai Pelatihan Pertanian Lampung tahun 2025 – 2029 ke dalam Rencana Strategis Unit Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung dan SKPD lingkup pertanian di daerah memerlukan pengaturan lebih lanjut tentang bentuk dan jenis kegiatan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang harus dilaksanakan di masing- masing lintas jenjang pemerintahan.

Balai Pelatihan Pertanian Lampung didukung oleh aparatur Sipil Negara (ASN) sejumlah 80 orang (PNS : 48, PPPK : 25, CPNS : 7) dan Tenaga Harian Lepas sejumlah 7 Orang (data per Desember 2025). Jumlah ASN bergerak dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, yang disebabkan oleh antara

lain: mutasi pegawai baik kedalam maupun keluar, pensiun, meninggal dunia, rekrutmen baru (CPNS), promosi dan demosi pegawai.

Balai Pelatihan Pertanian Lampung memiliki rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur, serta pengaturan hubungan inter dan antar organisasi/lembaga pemerintah. Tata hubungan kerja antara Pemerintah dengan Provinsi/ Kabupaten/Kota berlandaskan pada asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan serta desentralisasi. Program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas dekonsentrasi hanya dapat dilaksanakan oleh dinas provinsi. Sedangkan program dan kegiatan pembangunan pertanian berdasarkan asas tugas pembantuan dapat dilaksanakan di dinas provinsi maupun di dinas kabupaten/kota. Penataan dan Penguatan kapasitas kelembagaan Bapeltan Lampung ke daerah dilakukan dengan memperhatikan Kebijakan pembangunan nasional, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta peraturan perundangan terkait yang berlaku. Seiring dengan perkembangan, tantangan, dan tuntutan perubahan, baik eksternal maupun internal, maka organisasi dan tatalaksana Kementerian Pertanian harus dijalankan secara dinamis untuk menuju pemerintahan yang baik (good governance).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Rencana Strategis Balai Pelatihan Pertanian Lampung mengacu pada Renstra Badan PPSDM Pertanian yaitu program **Sumber Daya Manusia Pertanian yang produktif, maju, mandiri, dan sejahtera dalam mewujudkan pertanian maju berkelanjutan yang bermanfaat bagi rakyat menuju Indonesia Emas 2045**, yang dijabarkan pada kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yaitu Kegiatan Pemantapan Pelatihan Vokasi pertanian dalam meningkatkan kesempatan kerja SDM pertanian, produksi dan daya saing pertanian yang berorientasi ekspor. Dalam mengimplementasikan Program tersebut Pusat Pelatihan Pertanian merumuskan kegiatan dan indikator kedalam empat pilar yaitu : (i) Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian; (ii) Kelembagaan Pelatihan Pertanian; (iii) Peningkatan Ketenagaan Pelatihan Pertanian; (iv) Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023, target kinerja didefinisikan sebagai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Penetapan target kinerja pada Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh program peningkatan kapasitas SDM pertanian di wilayah kerja dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Pendekatan perumusan target kinerja Bapeltan Lampung Tahun 2025–2029 dilakukan melalui penerjemahan pohon kinerja (cascading) dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dan Kementerian Pertanian.

Tabel di bawah ini merangkum target kinerja strategis Bapeltan Lampung untuk periode lima tahun ke depan:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani	Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas	%	1	1	1	1	1
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Bapeltan Lampung yang Akuntabel	Indeks Tata Kelola Birokrasi Bapeltan Lampung	Indeks	0.7798	0.78	0.7802	0.7804	0.7806

Peningkatan Kelas Kemampuan Pelaku Usaha Tani: Bapeltan Lampung berfokus pada transformasi pelaku usaha tani melalui pelatihan vokasi dan pendampingan. Target 1% per tahun ditetapkan secara realistis dengan mempertimbangkan proses perubahan perilaku dan adopsi teknologi yang memerlukan waktu. Indikator "Naik Kelas" mencakup perbaikan dalam aspek manajerial, akses pasar, dan legalitas usaha tani di wilayah Lampung dan sekitarnya.

Tata Kelola Birokrasi: Melalui pencapaian target Indeks Tata Kelola, Bapeltan Lampung berkomitmen pada continuous improvement dalam hal pelayanan publik, transparansi keuangan, dan efektivitas proses bisnis di lingkup balai. .

Analisis dan Strategi Pencapaian

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2025	2026	2027 (Est)	2028 (Est)	2029 (Est)
1. Peningkatan Kompetensi Peserta Pelatihan	Indeks Kesenjangan Kompetensi (Aparatur)	20.00%	18.00%	16.00%	14.00%	12.00%
	Indeks Kesenjangan Kompetensi (Non Aparatur)	25.00%	23.00%	21.00%	19.00%	17.00%
2. Kepuasan Penyelenggaraan Pelatihan	Indeks Kepuasan Peserta (Skala 1-5)	4	4.1	4.2	4.3	4.4
3. Kualitas Pengelolaan Anggaran	Nilai IKPA Bapeltan Lampung	90.00%	90.25%	90.50%	90.75%	91.00%
4. Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4)	3.6	3.61	3.62	3.63	3.64

A. Penurunan Kesenjangan Kompetensi

Target utama adalah menurunkan persentase kesenjangan kompetensi sebesar 2% setiap tahunnya, baik untuk Aparatur maupun Non-Aparatur.

Strategi: Pemutakhiran kurikulum berbasis kebutuhan pasar (demand-driven) dan pemanfaatan teknologi digital (E-Learning) untuk memperluas jangkauan pelatihan.

B. Kualitas Penyelenggaraan dan Kepuasan Peserta

Indeks kepuasan peserta diproyeksikan meningkat secara bertahap menuju angka 4.4 (Skala 5) pada tahun 2029.

Strategi: Peningkatan kualitas sarana prasarana asrama, konsumsi, dan kompetensi widyaiswara dalam menyampaikan materi.

C. Tata Kelola Anggaran (IKPA)

Mempertahankan dan meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di atas 90.00%.

Strategi: Penguatan akurasi penyerapan anggaran sesuai rencana penarikan dana (RPD) dan kepatuhan terhadap regulasi perbendaharaan.

D. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Mempertahankan standar pelayanan prima pada skala 3.6 (Sangat Baik) dengan peningkatan tipis yang konsisten.

Strategi: Digitalisasi sistem pengaduan dan transparansi informasi layanan publik kepada seluruh pengguna jasa Bapeltan Lampung.

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan instrumen krusial yang menyelaraskan ketersediaan sumber daya finansial dengan target capaian kinerja organisasi. Dalam periode lima tahun ke depan, Bapeltan Lampung berkomitmen pada pengelolaan anggaran yang berbasis pada prinsip **Value for Money** (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas) guna memastikan setiap rupiah yang dialokasikan mampu menghasilkan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi SDM pertanian.

1. Proyeksi Kebutuhan Anggaran

Pendanaan diarahkan untuk mendukung pilar-pilar utama transformasi balai, yang mencakup:

- **Modernisasi Sarana Pelatihan:** Investasi pada teknologi *Smart Farming*, laboratorium lapangan, dan pembaruan alat mesin pertanian (alsintan).
- **Operasional Pelatihan Berbasis Kompetensi:** Penyelenggaraan pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur maupun non-aparatur (petani milenial dan pelaku usaha).
- **Pemeliharaan Aset Strategis:** Perawatan intensif terhadap mess, ruang kelas, dan lahan praktik agar tetap memiliki daya saing dalam layanan publik.
- **Koordinasi Kewilayahan:** Penguatan peran balai dalam sinkronisasi program pertanian di tingkat wilayah kerja.

2. Diversifikasi Sumber Pendanaan

Kebutuhan pendanaan Bapeltan Lampung selama periode 2025–2029 dipenuhi melalui skema hulu-hilir yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN):

A. Rupiah Murni (RM)

Alokasi ini berfungsi sebagai tulang punggung (*backbone*) stabilitas organisasi, yang difokuskan pada:

- **Belanja Pegawai:** Pemenuhan hak gaji, tunjangan kinerja, dan pengembangan profesionalisme aparatur.
- **Belanja Barang Operasional:** Biaya rutin kantor, langganan daya dan jasa, serta keperluan administrasi harian.
- **Program Prioritas Nasional:** Pendanaan kegiatan pelatihan yang bersifat mandatori dari Kementerian Pertanian untuk mencapai target swasembada pangan.

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Bapeltan Lampung mengoptimalkan potensi aset negara untuk menghasilkan pendapatan yang dikelola kembali guna meningkatkan layanan. Strategi optimalisasi PNBP meliputi:

- **Pemanfaatan Sarana Prasarana:** Komersialisasi mess/asrama dan penyewaan ruang pertemuan bagi pihak eksternal dengan tarif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- **Laboratorium dan Lahan Praktik:** Pendayagunaan lahan untuk produksi benih/bibit unggul serta jasa konsultasi teknis pertanian.
- **Pemanfaatan Alsintan:** Layanan jasa sewa alat mesin pertanian untuk mendukung mekanisasi pertanian di sekitar wilayah balai.

3. Strategi Pengelolaan dan Akuntabilitas

Untuk menjamin transparansi, Bapeltan Lampung menerapkan sistem monitoring ketat terhadap realisasi anggaran melalui:

1. **Analisis Standard Biaya (ASB):** Memastikan biaya yang dikeluarkan standar dan tidak terjadi pemborosan.
2. **Mitigasi Risiko Keuangan:** Melakukan pengawasan internal secara berkala untuk mencegah terjadinya deviasi anggaran.
3. **Digitalisasi Pelaporan:** Penggunaan sistem informasi terpadu dalam pencatatan PNBP dan pelaporan realisasi fisik-keuangan secara *real-time*.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelatihan Pertanian Lampung Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kegiatan operasional dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sumber daya manusia pertanian. Renstra ini menjadi acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pelatihan pertanian, yang selaras dengan kebijakan Pusat Pelatihan Pertanian, BPPSDMP, serta program strategis Kementerian Pertanian dalam periode 2025–2029.

Dalam implementasinya, Renstra Balai Pelatihan Pertanian Lampung dihadapkan pada dinamika lingkungan strategis, tuntutan perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap kualitas layanan pelatihan pertanian. Oleh karena itu, Renstra ini bersifat adaptif dan terbuka terhadap kemungkinan dilakukan penyesuaian atau reviu secara berkala guna menyempurnakan arah kebijakan dan dukungan kegiatan, sehingga pelaksanaannya dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Balai Pelatihan Pertanian Lampung Tahun 2025–2029 sangat bergantung pada komitmen dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Dukungan aktif dari seluruh jajaran internal, pemangku kepentingan terkait, serta mitra kerja diharapkan dapat memastikan terlaksananya langkah-langkah operasional sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan peran masing-masing, guna mewujudkan peningkatan kompetensi aparatur dan non aparatur pertanian serta mendukung pembangunan pertanian nasional secara berkelanjutan.

LAMPIRAN

Target kinerja dan anggaran BAPELTAN Lampung 2025 – 2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
SK.3	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)				Indikator Baru						32.856,38	57.834,20	296.491,69	314.685,75	333.145,82	- Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) - Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan)
	IKSK 3.1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	UPT	%	Indikator Baru	20	18	16	14	12						
	KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
	RO	Pelatihan vokasi pertanian bagi aparatur		Orang	2.328	2.028	18.567	31.258	33.258	35.258	8.249,85	20.716,66	127.156,74	135.292,69	143.428,64	
	KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM														
	RO	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		Orang	630	211	1.000	1.386	1.722	2.058	483,78	2.879,00	4.211,00	5.750,00	7.555,00	
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	8	-	9	9	9	2.000,00	-	7.814,25	7.814,25	7.814,25	
	KRO	Kerja Sama														

	RO	Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	9	9	9	-	-	992,57	992,57	992,57	
	IKSK 3.2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)		%	Indikator Baru	25	23	21	19	17						
Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
	KRO	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan														
	RO	Pelatihan pertanian bagi non aparatur		Orang	15.409	72.171	33.685	35.685	37.685	39.685	20.122,74	33.558,55	124.897,50	131.897,50	138.897,50	
	KRO	Sertifikasi Profesi dan SDM														
	RO	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian		Orang	RO Baru	-	-	2.000	2.500	3.000	-	-	6.076,48	7.595,60	9.114,72	
	KRO	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga														
	RO	Penumbuhan dan Penguatan P4S		Lembaga	100	-	34	514	514	514	-	680,00	15.420,00	15.420,00	15.420,00	
	KRO	Koordinasi														
	RO	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan		Kegiatan	62	7	-	9	9	9	2.000	-	8.930,57	8.930,57	8.930,57	
	KRO	Kerja Sama														
	RO	Kerja sama pelatihan vokasi bidang pertanian		Kegiatan	RO Baru	-	-	9	9	9	-	-	992,57	992,57	992,57	

SK.4	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan				Indikator Baru						19.334,01	10.692,14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	- BBPMKP - BBPP - Bapelttan
	IKSK 4.1	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	UPT	Skala Likert (1-5)	Indikator Baru	4	4,1	4,2	4,3	4,4						
	KRO	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup														
Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Lokasi	Satuan	Baseline	Target					Alokasi Dana (Dalam Juta Rupiah)					Unit Pelaksana	
					2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
RO	Sarana pelatihan pertanian		Unit	10	10	10	10	10	10	10	4.334,01	3.992,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
KRO	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup															
RO	Prasarana Pelatihan Pertanian		Unit	RO Baru	1	9	10	10	10	10	15.000,00	6.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Lampiran 1. Prasarana dan Sarana Pendukung Balai Pelatihan Pertanian Lampung

NO.	SARANA/PRASARANA	VOLUME (UNIT)	KAPASITAS (ORANG)	KETERANGAN
1.	Aula	1	150	baik
2.	Ruang Kelas	8	240	baik
3.	Asrama	7	206	baik
4.	Ruang Makan	1	100	baik
5.	Guest House	6	60	baik
6.	Perpustakaan	1	30	baik
7.	Sarana Ibadah	1	60	baik
8.	Luas Lahan	8,7 Ha.	-	baik

Lampiran 2. Keragaan Ketenagaan Balai Pelatihan Pertanian Lampung

A. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	URAIAN	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	SMA	SMP	SD	JUMLAH
1	Struktural	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	Widyaiswara		12	-	-	-	-	-	-	-	-	12
3	Fungsional Khusus		-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Fungsional Umum		6	19	-	-	3	-	11	1	1	41
	TOTAL	1	20	20	-	-	3	-	11	1	1	57
	%	1,8	35,1	35,1	-	-	5,2	-	19,3	1,8	1,8	100

B. Berdasarkan Tingkat Golongan

NO.	URAIAN	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV	JUMLAH
1	Struktural	-	-	-	3	3
2	Widyaiswara	-	-	8	6	14
3	Fungsional Khusus	-	-	1	-	1
4	Fungsional Umum	1	9	28	1	39
	TOTAL	1	9	37	10	57
	%	1,75	15,79	64,91	17,54	100

C. Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
1	Struktural	2	1	3

NO.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		L	P	JUMLAH
2	Widyaiswara	6	8	14
3	Fungsional Khusus	-	1	1
4	Fungsional Umum	24	15	39
	TOTAL	32	25	57
	%	56,14	43,85	100

Lampiran 3. Sebaran Widyaiswara Balai Pelatihan Pertanian Lampung

A. Sebaran Widyaiswara Berdasarkan Pendidikan

NO.	SPESIALISASI WIDYAIWARA	S1	S2	S3	JUMLAH
1.	Spesialisasi Budidaya Tanaman	-	3	-	3
2.	Spesialisasi Penyuluhan	-	2	-	2
3.	Spesialisasi Sosial Ekonomi Pertanian	-	2	-	2
4.	Spesialisasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	-	5	-	5
5.	Spesialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	-	1	-	1
6.	Spesialisasi Pengolahan Limbah	-	1	-	1
	TOTAL	-	14	-	14
	%	-	100	-	100

B. Sebaran Widyaiswara Berdasarkan Jabatan

NO.	SPESIALISASI WIDY AISWARA	WI PERTAMA	WI MUDA	WI MADYA	WI UTAMA	JUMLAH
1.	Spesialisasi Budidaya Tanaman	-	1	1	1	3
2.	Spesialisasi Penyuluhan	-	2	-	-	2
3.	Spesialisasi Sosial Ekonomi Pertanian	-	1	1	-	2
4.	Spesialisasi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1	1	2	1	5
5.	Spesialisasi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	1	-	-	-	1
6.	Spesialisasi Pengolahan Limbah	-	1	-	-	1
	TOTAL	2	6	4	2	14
	%	14,29	42,86	28,57	14,29	100

Lampiran 4. Jumlah Kelembagaan Pusat Pelatihan Pertanian Swadaya (P4S) Berdasarkan Klasifikasi Per Provinsi

NO.	PROVINSI	PEMULA	MADYA	UTAMA	JUMLAH
1.	Sumatera Selatan	19	5	1	25
2.	Bangka Belitung	11	3	1	15
3.	Bengkulu	31	5	-	36
4.	Lampung	41	13	4	58
	Jumlah	104	24	6	134